



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3511505, FAKSIMILE (021) 3511486, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : Und - 84 /PK/2017
Sifat : Segera
Hal : Undangan Workshop

00 November 2017

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
(terlampir)

Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Tahun Anggaran 2018, kami bermaksud untuk menyelenggarakan **Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2018**. Tujuan penyelenggaraan workshop tersebut adalah agar: (1) peraturan bupati/walikota mengenai tata cara penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa dapat disusun dan ditetapkan secara tepat waktu, mengingat peraturan dimaksud merupakan salah satu syarat penyaluran Dana Desa; (2) penyampaian pokok-pokok yang perlu dimuat dalam peraturan bupati/walikota dimaksud agar selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan (3) pemberian asistensi penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa berdasarkan pagu Dana Desa pada APBN TA 2018.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami meminta bantuan Saudara untuk menunjuk 3 (tiga) orang pejabat/pegawai dari unit yang menangani bidang keuangan, pemerintahan/pemberdayaan masyarakat desa, dan *legal drafting* peraturan daerah, agar dapat hadir pada workshop yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Senin-Selasa, 27-28 November 2017
(jadwal per Kabupaten/Kota terlampir)

Waktu : 08.30 WIB s.d. selesai

Tempat : Hotel Redtop, Jalan Pecenongan No. 72 Jakarta Pusat

Penyelenggaraan workshop tersebut tidak dipungut biaya. Panitia menyediakan konsumsi selama kegiatan berlangsung, sedangkan akomodasi dan transportasi dibebankan kepada anggaran perjalanan dinas masing-masing daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Boediarso Teguh Widodo
NIP. 19580823 198210 1 001



Jadwal Acara

Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2018

Hotel Redtop, Jalan Pecenongan No. 72 Jakarta Pusat

Waktu	Acara	PIC
08.00 – 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30 – 08.45	Laporan Panitia	Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan
08.45 – 09.30	<i>Keynote Speech</i> dan Pembukaan	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
09.30 – 09.40	<i>Coffee Break</i>	
Pemaparan Materi Secara Panel		
09.40 – 11.40	Materi I : Kebijakan Dana Desa TA 2018	Kemenkeu
	Materi II : Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pokok-Pokok Muatan Revisi Permendagri 113 Tahun 2014	Kemendagri
	Materi III : Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018	Kemendes dan PDT
11.40 – 12.45	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
12.45 – 13.30	ISHOMA	
Peserta Dibagi ke Dalam Kelompok/Kelas		
13.30 – 15.00	Pokok Muatan Peraturan Bupati/Walikota dan Bimbingan Penghitungan Dana Desa	• Instruktur • Peserta membawa perlengkapan laptop
15.00 – 15.15	<i>Coffee Break</i>	
15.15 – 16.30	Lanjutan (Bimbingan Penghitungan Dana Desa)	• Instruktur • Peserta membawa perlengkapan laptop
16.30 – 17.00	Penutupan	Panitia

Mohon perhatian:

1. Untuk mendukung pelaksanaan acara, mohon dapat melakukan konfirmasi kehadiran melalui email ke subditdok.djpk@gmail.com atau telepon ke 021-3511505, Sdr. Dastam (0812 9055 594)
2. Panitia tidak menanggung transportasi dan akomodasi selama acara berlangsung.
3. Peserta workshop agar membawa laptop dan media pemindah data (*flashdisk*).

Lampiran

Nomor : Und-~~81~~21/ PK/2017

Tanggal : 10 November 2017

DAFTAR UNDANGAN
WORKSHOP PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
MENGENAI TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TA 2017
TANGGAL 27 NOVEMBER 2017

No.	Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Utara	
1	Kab. Asahan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Dairi
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Deli Serdang
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Karo
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kab. Labuhanbatu
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
6	Kab. Langkat
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
7	Kab. Mandailing Natal
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
8	Kab. Nias
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
9	Kab. Simalungun
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
10	Kab. Tapanuli Selatan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
11	Kab. Tapanuli Tengah
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
12	Kab. Tapanuli Utara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
13	Kab. Toba Samosir
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
14	Kota Padang Sidempuan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
15	Kab. Pakpak Bharat
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
16	Kab. Nias Selatan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
17	Kab. Humbang Hasundutan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
18	Kab. Serdang Bedagai
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
19	Kab. Samosir
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
20	Kab. Batu Bara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
21	Kab. Padang Lawas
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
22	Kab. Padang Lawas Utara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
23	Kab. Labuhanbatu Selatan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
24	Kab. Labuhanbatu Utara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
25	Kab. Nias Utara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
26	Kab. Nias Barat
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
27	Kota Gunungsitoli
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

Lampiran

Nomor : Und-84 /PK/2017

Tanggal : 10 November 2017

DAFTAR UNDANGAN
WORKSHOP PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
MENGENAI TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TA 2017
TANGGAL 27 NOVEMBER 2017

No.	Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Selatan	
1	Kab. Lahat
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Musi Banyuasin
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Musi Rawas
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Muara Enim
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kab. Ogan Komering Ilir
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
6	Kab. Ogan Komering Ulu
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
7	Kota Prabumulih
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
8	Kab. Banyuasin
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
9	Kab. Ogan Ilir
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
10	Kab. OKU Timur
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
11	Kab. OKU Selatan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
12	Kab. Empat Lawang
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
13	Kab. PALI
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
14	Kab. Musi Rawas Utara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

Provinsi Kalimantan Barat	
1	Kab. Bengkayang
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Landak
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Kapuas Hulu
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Ketapang
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kab. Mempawah
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
6	Kab. Sambas
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
7	Kab. Sanggau
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
8	Kab. Sintang
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
9	Kab. Sekadau
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
10	Kab. Melawi
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
11	Kab. Kayong Utara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
12	Kab. Kubu Raya
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

Lampiran

Nomor : Und-~~84~~ /PK/2017

Tanggal : 10 November 2017

DAFTAR UNDANGAN
WORKSHOP PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
MENGENAI TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TA 2017
TANGGAL 27 NOVEMBER 2017

No.	Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Barat	
1	Kab. Bandung
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Bekasi
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Bogor
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Ciamis
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kab. Cianjur
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
6	Kab. Cirebon
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
7	Kab. Garut
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
8	Kab. Indramayu
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
9	Kab. Karawang
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
10	Kab. Kuningan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
11	Kab. Majalengka
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
12	Kab. Purwakarta
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
13	Kab. Subang
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
14	Kab. Sukabumi
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
15	Kab. Sumedang
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
16	Kab. Tasikmalaya
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
17	Kota Banjar
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
18	Kab. Bandung Barat
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
19	Kab. Pangandaran
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

Lampiran

Nomor : Und-~~84~~ /PK/2017

Tanggal : 10 November 2017

DAFTAR UNDANGAN
WORKSHOP PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
MENGENAI TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TA 2017
TANGGAL 27 NOVEMBER 2017

No.	Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Tengah	
1	Kab. Banggai
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Banggai Kepulauan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Buol
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Toli-Toli
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kab. Donggala
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
6	Kab. Morowali
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
7	Kab. Poso
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
8	Kab. Parigi Moutong
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
9	Kab. Tojo Una Una
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
10	Kab. Sigi
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
11	Kab. Banggai Laut
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
12	Kab. Morowali Utara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

Provinsi Sulawesi Tenggara	
1	Kab. Buton
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Konawe
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Kolaka
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Muna
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kab. Konawe Selatan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
6	Kab. Bombana
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
7	Kab. Wakatobi
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
8	Kab. Kolaka Utara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
9	Kab. Konawe Utara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
10	Kab. Buton Utara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
11	Kab. Konawe Kepulauan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
12	Kab. Kolaka Timur
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
13	Kab. Muna Barat
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
14	Kab. Buton Tengah
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
15	Kab. Buton Selatan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

Lampiran

Nomor : Und-²⁴ /PK/2017

Tanggal : 20 November 2017

DAFTAR UNDANGAN
WORKSHOP PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
MENGENAI TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TA 2017
TANGGAL 27 NOVEMBER 2017

No.	Kabupaten/Kota
Provinsi Papua Barat	
1	Kab. Fak Fak
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Manokwari
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Sorong
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Raja Ampat
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kab. Sorong Selatan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
6	Kab. Teluk Bintuni
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
7	Kab. Teluk Wondama
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
8	Kab. Kaimana
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
9	Kab. Maybrat
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
10	Kab. Tambrauw
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
11	Kab. Manokwari Selatan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
12	Kab. Pegunungan Arfak
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum